

e-news letter

FEB IV 2020

PKSPARLEMEN

KREATIF SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Ketua Majelis Syuro PKS
Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, MA

Minta Para Aleg PKS,
**Buat terobosan
dan ide cemerlang
bagi rakyat**



Belajar Mengambil Inisiatif

Tidak mudah mengambil keputusan dalam keadaan tidak ideal, karena apapun yang hendak dikerjakan seringkali dianggap salah dan disalahartikan.

Bahkan dalam Bahasa kultus pesimis: tidak mungkin berhasil. Terlebih dalam konteks yang lebih luas, banyak pihak menaruh pandangan dari persepsi yang kurang tepat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI tidak mau terjebak pada stigma dan arus yang salah, senantiasa terus berbenah banyak hal yang belum baik, seraya berharap menggapai sejumlah capaian di depan mata.

Akhir pekan kemarin dari tanggal 21 – 23 Februari 2020, Fraksi PKS mengadakan Kursus

Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) 2020 dengan mengambil tema “Mengokohkan Ketahanan Nasional Menjawab Tantangan Global”.

Sebuah langkah aktif dari Fraksi PKS untuk seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Disaat ada sebuah lembaga negara yang menegaskan Agama sebagai ancaman Pancasila, Fraksi PKS menegaskan bahwa tidak mungkin memisahkan antara keduanya. Bahkan dalam sejumlah praktik implementatif Agama mewarnai banyak sendi kehidupan

masyarakat.

Ketua Fraksi PKS DPR RI menjabarkan prinsip Kebhinekaan harus sama-sama kita kokohkan di dalam diri setiap anggota Fraksi PKS dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, jika ada yang bocor kita perbaikan bersama, kalau ada yang rusak kita harus bersihkan dan kita bersama harus menjadi rumah bagi rakyat di Republik Indonesia saat nantinya kita memimpin bangsa ini.

Kursus singkat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang kebangsaan sekaligus mengokohkan komitmen kita, tanggung jawab kita, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

Kursus singkat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang kebangsaan sekaligus mengokohkan komitmen kita, tanggung jawab kita, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan pimpinan lembaga negara yang mendukung penuh acara ini dari TNI, Kapolri, Mendagri, Gubernur Lemhanas, Kepala BIN, Kepala BNPT dan pembicara lain. PKS siap bersinergi dengan lembaga

negara dalam rangka mengokohkan ketahanan nasional dan menjawab tantangan global. Mohon maaf kami akan berhenti acuh, kami memilih berinisiatif meski tampak kepemimpinan tidak dalam genggamannya. Ini masalah harga diri menjadi penyeimbang yang konstruktif

Humas FPKS DPR RI



KURSUS SINGKAT KETAHANAN NASIONAL

PKS 2020

Selamat & Sukses

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL PIMPINAN & ANGGOTA DPRD PKS SE-INDONESIA

Mengokohkan Ketahanan
Nasional Menjawab
Tantangan Global

Grand Sahid Jaya
Jakarta,
21-23 Februari 2020

Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA
Ketua Majelis Syuro PKS

H.M. Sohibul Iman, Ph.D
Presiden PKS

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



KURSUS SINGKAT KETAHANAN NASIONAL PKS 2020

Grand Sahid Jaya | Jakarta, 21-23 Februari 2020



SESI 1

**Strategi Moderasi Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara dalam
Menghadapi Ancaman Terorisme**

Narasumber

Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H.
Kepala BNPT



SESI 4

**Tantangan Ketahanan Nasional
di Era Globalisasi dan
Era Post-Truth**

Narasumber

Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si
Kepala Bareskrim Polri



SESI 2

**Tantangan Keamanan Global dan
Kawasan Laut China Selatan terhadap
Geopolitik & Geostrategi Indonesia**

Narasumber

Mayjen TNI Andjar Wiratma
Asisten Intelijen Panglima TNI



SESI 5

**Strategi Deteksi dan Cegah Dini
terhadap Ancaman dan Tantangan
Keamanan Nasional**

Narasumber

Letjen TNI (purn) Muhamad Munir
Ketua Dewan Analis Strategis BIN



SESI 3

**Ancaman Kejahatan Transnasional
terhadap Masa Depan Indonesia**

Narasumber

Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo
Gubernur LEMHANAS



SESI 6

**Menegakkan Demokrasi di Daerah
dalam Kemajemukan Bangsa**

Narasumber

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Arahan Presiden PKS: Anggota DPR dan DPRD PKS Pelopor Kohesi Sosial di Masyarakat

Mereka pulang dari sini harus memahami konteks ketahanan negara. Kemudian jadi pelopor membangun ketahanan nasional dengan segala dimensinya. Kader PKS harus terdepan membangun kohesi sosial dalam konteks Indonesia yang beragam

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D

Presiden PKS

Jakarta (21/02) — Presiden PKS Mohamad Sohbul Iman meminta agar setiap anggota DPR dan DPRD dari PKS menjadi pelopor dalam kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Hal ini disampaikan Presiden PKS dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kab./Kota dari PKS seluruh Indonesia.

Sohbul Iman menyebut, Kursus Singkat Ketahanan Nasional akan menjadi bekal para Anggota DPR dan DPRD

dari PKS untuk jadi pelopor ketahanan nasional di masing-masing Dapilnya.

"Mereka pulang dari sini harus memahami konteks ketahanan negara. Kemudian jadi pelopor membangun ketahanan nasional dengan segala dimensinya. Kader PKS harus terdepan membangun kohesi sosial dalam konteks Indonesia yang beragam," ujar Kang Iman di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (21/2/2020) malam.

Kang Iman mengingatkan, kader PKS harus bisa berkawan secara spontan dengan siapa saja. Kader PKS, papar dia,

harus memiliki pola pikir bahwa semua yang ada di negeri ini adalah saudara kita.

"Mindset kita harus menganggap semua orang pasti mencintai Indonesia, sebelum terbukti dia merusak Indonesia. Jika tidak terbukti dia merusak Indonesia kita adalah saudara sehingga tidak tumbuh prasangka," terang mantan rektor Universitas Paramadina ini.

Ia mengkritik dua kelompok manusia yang pertama menganggap kelompoknya yang memiliki Indonesia sementara yang berbeda dianggap bukan pemilih Tanah Air. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak punya rasa kepemilikan terhadap negeri ini.

"Dua jenis manusia ini parasit. Tidak boleh ada di keluarga PKS rasa tidak memiliki terhadap Indonesia. Begitu juga menganggap diri paling memiliki Indonesia," tukas dia mengingatkan.

Foto : Hilal



Ketua Fraksi PKS: KSKN 2020 Bukti Komitmen Anggota Dewan pada NKRI

Prinsip Kebhinekaan ini ini harus sama-sama kita kokohkan di dalam diri setiap anggota Fraksi PKS dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, jika ada yang bocor kita perbaiki bersama, kalau ada yang kusam kita harus bersihkan dan kita bersama harus menjadi rumah bagi rakyat di Republik Indonesia saat nantinya kita memimpin bangsa ini

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (21/02) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini mengapresiasi kehadiran ratusan anggota Dewan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mulai dari pusat hingga kabupaten/kota dalam agenda Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) 2020.

Jazuli mengaku bangga dengan respon semua teman-teman anggota Dewan Fraksi PKS se-Indonesia, yang sudah meng-agendakan hadir dalam acara perdana Fraksi PKS ini.

"Acara ini sengaja dibuat oleh Fraksi sebagai etalase Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana disampaikan Presiden PKS. Acara adalah bagian dari acara besar yang digagas Partai, mulai dari acara ini hingga pekan kemarin acara Parlemen Dunia", ungkap Jazuli Juwaini.

Lebih lanjut Jazuli yang merupakan anggota DPR Komisi I ini juga menyatakan agenda ini merupakan bukti komitmen Partai Keadilan Sejahtera dalam menjaga dan

menghormati Kebhinekaan atau prinsip Bhineka Tunggal.

"Prinsip Kebhinekaan ini ini harus sama-sama kita kokohkan di dalam diri setiap anggota Fraksi PKS dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, jika ada yang bocor kita perbaiki bersama, kalau ada yang kusam kita harus bersihkan dan kita bersama harus menjadi rumah bagi rakyat di Republik Indonesia saat nantinya kita memimpin bangsa ini", tegasnya.



Fraksi PKS DPR Gelar Kursus Singkat Ketahanan Nasional 2020

Dari 320 peserta yang konfirmasi, yang hadir lebih dari 500 peserta, bahkan masih terus bertambah hingga esok hari. Kami mengucapkan terimakasih atas kehadiran peserta yang terus berdatangan, semoga memberikan manfaat bagi seluruh anggota Dewan Fraksi PKS

H. SUKAMTA, Ph.D

Ketua Panitia KSKN 2020 Fraksi PKS

Jakarta (21/02) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggelar Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) 2020 yang diikuti lebih dari 500 anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, Jumat, (21/02/2020).

Ketua Panitia KSKN 2020 Fraksi PKS Sukamta mengatakan dari 320 peserta yang konfirmasi, yang hadir lebih dari 500 peserta, bahkan masih terus bertambah hingga esok hari.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kehadiran

peserta yang terus berdatangan, semoga memberikan manfaat bagi seluruh anggota Dewan Fraksi PKS", pungkash Sukamta.

Lebih lanjut Sukamta mengatakan sejak hari ini hingga hari Ahad, acara ini akan diisi oleh sejumlah stakeholder dari Negara yang kita cintai.

"insyaAllah besok akan dihadiri Kepala BNPT, Panglima TNI, Kapolri yang diwakili Kepala Bareskrim, Ketua Lemhanas, dan stakeholder lainnya", terang Sukamta.

Sukamta menambahkan

selain pemaparan materi dari pihak yang berkompeten, acara ini pun diisi dengan pameran foto kiprah anggota DPR dari tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota dan juga bazar yang dilakukan oleh sejumlah pelaku ekonomi.

"Kami juga tampilan foto-foto kiprah anggota Dewan Fraksi PKS dari Pusat hingga Kabupaten/Kota. Dan juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk bergabung meramalkan acara ini", tutup Anggota DPR asal Yogyakarta ini.



Fraksi PKS Terdepan dalam Mengokohkan Ketahanan Nasional dan Menjawab Tantangan Global

Kursus singkat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang kebangsaan sekaligus mengokohkan komitmen kita, tanggung jawab kita, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (21/02) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS DPR RI) selama tiga hari kedepan 21-23 Februari 2020 menyelenggarakan Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD, dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PKS seluruh Indonesia.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini KSKN ini diselenggarakan untuk membekali anggota legislatif

PKS di seluruh Indonesia tentang konsepsi ketahanan nasional (peluang, ancaman dan tantangannya) serta bagaimana bangsa ini menjawab tantangan global. Bekal ini penting karena Fraksi PKS berkomitmen menjadi yang terdepan dalam bela negara dan menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Kursus singkat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang kebangsaan sekaligus

mengokohkan komitmen kita, tanggung jawab kita, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tandas Jazuli dalam sambutannya.

PKS ingin memimpin Indonesia, lanjut Jazuli, oleh karenanya seluruh fitur kepemimpinan bangsa yang besar ini harus dikuasai. Atas dasar itu, Kursus Singkat Ketahanan Nasional ini diselenggarakan Fraksi PKS dengan mengangkat topik fundamental dan berbobot, menghadirkan para petinggi lembaga negara yang berperan penting dalam menjaga ketahanan nasional dan menjawab tantangan global.

Acara dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Orasi Kebangsaan oleh Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Sementara Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri akan menyampaikan Arahan dan penguatan kebangsaan PKS di



akhir acara.

"Fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan pimpinan lembaga negara yang mendukung penuh acara ini dari Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Gubernur Lemhanas,

Kepala BIN, Kepala BNPT dan pembicara lain. PKS siap bersinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka mengokohkan ketahanan nasional dan menjawab tantangan global," ungkap Jazuli

Bekali Fraksi PKS dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional

Kepala BNPT Sampaikan Pengetahuan Penanggulangan Terorisme Komprehensif

Tantangan kita semakin berat, arus informasi dan perangkat yang semakin canggih ini sangat mungkin jadi boomerang. Efek sampingnya kita bisa jadi melupakan jati diri bangsa

Komjen. Pol. Drs. SUHARDI ALIUS, M.H

Kepala BNPT

www.bnpt.go.id - Jakarta – Pemahaman komprehensif terkait radikalisme sebagai salah satu ancaman pertahanan nasional perlu dimiliki utamanya oleh pemangku kepentingan negara. Karenanya, Kepala BNPT kali ini memberikan paparan dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi/Kab – Kota.

Bertempat di Ruang Puri Ratna, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kepala BNPT memberikan paparan dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional 2020 pada Sabtu (22/02). Dalam kesempatan kali ini Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. menyampaikan

strategi moderasi bangsa dalam menghadapi ancaman terorisme.

Dalam kesempatan ini Kepala BNPT menyampaikan materi dengan tema 'Mengokohkan Ketahanan Nasional Menjawab Tantangan Global Tahun 2020'. Dimoderatori Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE., Kepala BNPT menggambarkan cerminan ketahanan nasional terhadap rupa-rupa arus informasi global. Dalam kondisi tanpa saringan, ketahanan nasional dapat melemah terlebih dengan masifnya arus informasi radikalisme di dunia maya.

"Tantangan kita semakin berat, arus informasi dan perangkat yang semakin canggih ini sangat mungkin jadi

boomerang. Efek sampingnya kita bisa jadi melupakan jati diri bangsa, bangsa yang tidak kuat lagi identitasnya. Daya tahan kita dan generasi muda ini dapat melemah kalau kita tidak berpegang pada konsensus dasar yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI," ujar Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H.

Menyambung penjelasan sebelumnya, radikalisme agar tidak dianggap remeh. Eksistensi radikalisme yang ditunjukkan dengan perkembangan pola radikalisme memerlukan pengawasan dan ketahanan lebih dari tiap masyarakat. Pola yang dimaksud merujuk pada pola jejaring, di mana pola jejaring 'milenial' terorisme tersebut menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

"Pola bergeser, sekarang melalui website, media sosial, dan sosial messenger, indoktrinasi hingga pembai'atan online, itu tantangan kita. Dari sini kita harus menangannya dengan konsep karakter bangsa dari usia dini, kita bangun karakter kebangsaan dari



muda. Tidak melulu dengan kekerasan," ungkap mantan Kabaeskrim Polri.

Dalam paparannya, Kepala BNPT juga menyampaikan pencapaian dan pendekatan khas BNPT yang kini kian dipelajari negara lain. Pendekatan kemanusiaan yang tercermin dalam berbagai program seperti Silaturahmi Kebangsaan antara pelaku dan penyintas terorisme serta upaya Sinergisitas 38 K/L menerima

apresiasi oleh 600 peserta.

Selain itu, Kepala BNPT juga menekankan apa yang dapat mendefinisikan radikalisme negatif. Ia menyampaikan bahwa radikalisme bersifat positif dibutuhkan dalam pembangunan dan sumbangsih untuk negara.

Selengkapnya kunjungi
www.bnpt.go.id

Polri Ajak Pimpinan dan Aleg PKS, Jaga NKRI dari Kejahatan Transnasional

Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempertahankan wilayah negara kita untuk dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara. Segala upaya juga harus dilakukan untuk menjaga keutuhan negara kita baik dengan pikiran, tenaga bahkan hingga titik darah penghabisan, itulah Geopolitik NKRI

Komjen. Pol. LISTYO SIGIT PRABOWO

Kabareskrim Polri

Jakarta (22/02) — Memasuki hari kedua Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) yang digelar Fraksi PKS DPR RI, menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Dalam pemaparannya dengan tema Ancaman Kejahatan Transnasional terhadap Masa Depan Indonesia, Listyo Sigit Prabowo mengatakan berbagai cara dilakukan untuk menguasai suatu negara.

"Cara-cara yang dilakukan untuk menguasai suatu negara oleh negara lainnya itu

beraneka macam seperti yang terjadi pada sebelum kemerdekaan dengan tujuan untuk menguasai kekayaan alam negara kita," pungkasnya.

Mantan Kapolres Solo ini menambahkan bahwa upaya penguasaan terhadap kekayaan alam negara lain sudah bergeser dari cara fisik ke cara non fisik.

"Upaya untuk menguasai suatu bangsa sudah bergeser dari cara fisik peperangan ke cara lain yakni melakukan sebuah provokasi kepada sebagian masyarakat seperti yang terjadi di Suriah, Irak, dan sebagainya," terangnya.

Lebih lanjut Kabareskrim Polri mengajak seluruh peserta Kursus Singkat Ketahanan Nasional untuk bisa memperhatikan segala macam modus kejahatan transnasional yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

"Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempertahankan wilayah negara kita untuk dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara. Segala upaya juga harus dilakukan untuk menjaga keutuhan negara kita baik dengan pikiran, tenaga bahkan hingga titik darah penghabisan, itulah Geopolitik NKRI", tegas mantan Kapolda Banten ini.

Menurut Kabareskrim, berdasarkan survei yang dilakukan Lemhanas, Indeks Ketahanan Nasional negara kita dinilai cukup tangguh.

"Meskipun dikategorikan cukup tangguh, negara kita cenderung lebih rawan dengan adanya provokasi dan mengutamakan ego masing-masing sehingga muncul berbagai jenis kejahatan termasuk kejahatan transnasional", tutup Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.



KURSUS SINGKAT KETAHANAN NASIONAL

PKS 2020

Grand Sahid Jaya
Jakarta, 21-23 Februari 2020



Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo
Gubernur Lemhanas

**PKS Pilar Penting
Demokrasi di
Indonesia**

Parpol itu adalah pilar demokrasi, memperbaiki sistem politik dimulai dari parpol. Dalam hal ini, PKS adalah model bagi partai-partai politik lainnya

Perkuat Ketahanan Nasional

Gubernur Lemhanas Minta Aleg PKS Waspada Resiko Post Truth

"Kita sedang menyaksikan bagaimana revolusi teknologi mengubah secara fundamental seluruh segi kehidupan masyarakat. mulai dari cara kita hidup, bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. demikian pula dengan institusi-institusi sosial-ekonomi-politik yang mengatur kehidupan masyarakat

Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo

Gubernur Lemhanas

Jakarta (22/02) — Memasuki hari kedua Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) yang digelar Fraksi PKS DPR RI, menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Dalam pemaparannya dengan tema Ancaman Kejahatan Transnasional terhadap Masa Depan Indonesia, Listyo Sigit Prabowo mengatakan berbagai cara dilakukan untuk menguasai suatu negara.

"Cara-cara yang dilakukan untuk menguasai suatu negara oleh negara lainnya itu berane-

ka macam seperti yang terjadi pada sebelum kemerdekaan dengan tujuan untuk menguasai kekayaan alam negara kita," pungkasnya.

Mantan Kapolres Solo ini menambahkan bahwa upaya penguasaan terhadap kekayaan alam negara lain sudah bergeser dari cara fisik ke cara non fisik.

"Upaya untuk menguasai suatu bangsa sudah bergeser dari cara fisik peperangan ke cara lain yakni melakukan sebuah provokasi kepada sebagian masyarakat seperti yang terjadi di Suriah, Irak, dan

sebagainya," terangnya.

Lebih lanjut Kabareskrim Polri mengajak seluruh peserta Kursus Singkat Ketahanan Nasional untuk bisa memperhatikan segala macam modus kejahatan transnasional yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

"Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempertahankan wilayah negara kita untuk dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara. Segala upaya juga harus dilakukan untuk menjaga keutuhan negara kita baik dengan pikiran, tenaga bahkan hingga titik darah penghabisan, itulah Geopolitik NKRI", tegas mantan Kapolda Banten ini.

Menurut Kabareskrim, berdasarkan survei yang dilakukan Lemhanas, Indeks Ketahanan Nasional negara kita dinilai cukup tangguh.

"Meskipun dikategorikan cukup tangguh, negara kita cenderung lebih rawan dengan adanya provokasi dan mengutamakan ego masing-masing sehingga muncul berbagai jenis kejahatan termasuk kejahatan transnasional", tutup Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.



Ketua Dewan Analisis Strategis BIN Ajak Kader PKS Deteksi Potensi Pemecah Belah Bangsa

Saya mengajak bapak dan ibu serta seluruh kader PKS, untuk sedini mungkin melakukan deteksi terhadap hal-hal yang bisa memecah belah kesatuan negara yang kita cintai

Letjen TNI (purn) Muhammad Munir

Ketua Dewan Analisis Strategis BIN

Jakarta (22/02) — Ketua Dewan Analisa Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) Letjend TNI (Purn) Muhammad Munir dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) 2020 Fraksi PKS se-Indonesia mengatakan strategi deteksi dan cegah dini esensinya merupakan peran menjaga kedaulatan NKRI dengan segala upaya yang dimiliki.

"Bicara intelijen pada dasarnya adalah menjalankan peran sebagai mata dan telinga negara. Yang dilihat dan didengar bukan hanya kasat mata saja, tapi segala apa yang menjadi tantangan dan ancaman bagi bangsa dan negara," terang Muhammad Munir.

Selanjutnya Muhammad Munir menambahkan bahwa peran BIN harus mampu memprediksi trend apa yang akan terjadi di masa mendatang.

"Kita melihat data yang telah lalu. BIN juga mencermati dan mendeteksi dalam hal yang positif. Semakin majunya teknologi dan informasi, dinamika semakin kompleks dan ambigu sehingga sulit diprediksi", pungkasnya.

Sekarang ini, kata Muhammad Munir, perlu ada upaya pendeteksian infiltrasi ideologis, karena mulai banyak ideologi yang memiliki aspirasi untuk menguasai dunia dengan

cara memeralat.

"Strategi dini harus bisa mengukuhkan data sebanyak-banyaknya, terkait permasalahan dan melakukan identifikasi. Tidak mungkin mencegah kejadian tanpa big data untuk merumuskan strategi," tegasnya.

Selanjutnya Ketua Dewan Analisa Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan bagaimana strategi BIN dalam menghadapi ancaman, diantaranya. Pertama, mengoptimalkan peran dan kemampuan BIN dengan membangun big data.

"Yang kedua strateginya yakni mengintensifkan koordinasi, perintah secara nasional. Semua stakeholder seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan sebagainya harus di koordinasikan dengan baik," ungkapnya.

Ketiga, lanjut Munir yakni menyusun produk2 intelijen yang berkualitas, sehingga bisa jelas siapa pelakunya, bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, sehingga bisa memberikan



solusi agar ancaman tidak menimbulkan potensi.

"Berikutnya atau yang keempat yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Poin ini penting agar kita tidak tertinggal dengan yang lainnya dalam pemanfaatan teknologi. Dan yang Kelima atau terakhir tentunya kita harus meminta dukungan masyarakat", pungkasnya.

Di akhir pemaparannya,

pria yang dikenal dekat dengan para ulama ini juga mengajak kepada seluruh Aleg PKS untuk mendeteksi dini segala hal yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Saya mengajak bapak dan ibu serta seluruh kader PKS, untuk sedini mungkin melakukan deteksi terhadap hal-hal yang bisa memecah belah kesatuan negara yang kita cintai", tutup Muhammad Munir.

Wakil Ketua Majelis Syuro :

Aleg dan Kader PKS Harus Kawal Pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dengan Baik

Peran ini penting kita jaga dan kita hadirkan untuk menjaga ketahanan nasional. Ketika kita sudah punya komitmen dan cara mempertahankan ketahanan nasional maka itu akan menjawab tantangan-tantangan global dan juga berperan di dalamnya

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS

Jakarta (22/02) — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Hidayat Nur Wahid dalam orasi kebangsaan Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) 2020 menegaskan visi yang melahirkan Ketahanan Nasional sudah sejak awal dipatrikan oleh PKS, termasuk keputusan untuk memilih menjadi oposisi.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PKS, ketahanan nasional adalah pengamalan pancasila yang merupakan Pancasila hadiah terbesar bagi umat Islam Indonesia.

"Ketika proklamasi Indonesia maka pancasilanya adalah pancasila 22 Juli yang disepakati oleh tokoh-tokoh

kalangan nasionalis, sekuler, Islam baik dari organisasi masyarakat maupun politik dan tokoh nasrani", terang pria asal Klaten Jawa Tengah ini.

Lebih lanjut HNW mengatakan PKS harus mengawal Pancasila agar dilaksanakan dengan baik, bukan hanya mengatakan saya Pancasilais, tapi perilakunya juga Pancasila.

"Jika anda menyebut Ketuhanan Yang Maha Esa, mengapa anda mendukung LGBT, anda harus menolak PKI. Karena bertentangan dengan sila pertama. Kita khawatir itu bagian dari mengaburkan makna dari Pancasila. Jika anda Pancasila maka anda melaksanakan ibadah yang baik

dan benar," tegas HNW.

HNW juga berpesan bahwa Bagaimana cara PKS bisa mengawal Pancasila tapi juga mengawal NKRI dengan tidak men-stigma umat Islam dan partai Islam.

"Peran ini penting kita jaga dan kita hadirkan untuk menjaga ketahanan nasional. Ketika kita sudah punya komitmen dan cara mempertahankan ketahanan nasional maka itu akan menjawab tantangan-tantangan global dan juga berperan di dalamnya", terangnya.

HNW menambahkan salah satu tantangan global Islam dan demokrasi, Islam dan radikalisme, salah satu komitmen yang harus diwujudkan menghidupkan demokrasi di Indonesia, dan menghidupkan ketahanan global, sehingga tak layak dicurigai dan tidak diberikan peran.

"Bila ini bisa kita lakukan maka PKS dapat berkontribusi besar dan mengangkat Indonesia ke Global. Kalau PKS parpol Islam di mayoritas muslim dan bisa berkecimpung di dunia global, maka itu bisa mengoreksi dan menjawab fitnah relasi Islam dan Demokrasi", tutupnya.



Dirjen Politik & Pemerintah Umum Kemendagri Usulkan Pendanaan Parpol Ditambah

Hampir seluruh tugas negara dibebani kepada parpol padahal dananya kecil, sehingga berat perjalanannya. Maka jika ada praktik kotor itu wajar dalam ilmu pengetahuan, karena ada kebutuhan objektif cepat atau lambat untuk mengumpulkan pungli karena dana yang dimilikinya kecil

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Jakarta (23/02) — Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang hadir dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) Fraksi PKS se-Indonesia mengingatkan kembali ciri-ciri sebuah negara Demokrasi ada dua yakni wajib adanya Partai Politik (Parpol) dan adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Bahtiar, selama negara ini masih, selama Parpol masih ada dan Indonesia masih menyelenggarakan Pemilu, negeri ini masih disebut negara

demokrasi.

"Parpol hanya sebagai alat untuk kebijakan subjektif eksekutif kita pernah mengalami itu, ketika masa reformasi kita diberikan kemudahan dalam membuat Parpol, hanya dengan 50 orang bisa mendirikan parpol hanya dengan pengesahan Menkumham", ungkap Bahtiar.

Pemerintah dan DPR, lanjut Bahtiar, berpikir apakah UU Parpol bisa menjadikan Parpol lebih sehat dan intelektual. Pengaruh Parpol dan Ormas kadang tidak bisa dibedakan. Kadang Ormas lebih

banyak pengikutnya dari pada Parpol. Sehingga kita harus cek, sehingga satu-satunya lembaga negara dalam demokrasi adalah Parpol.

"Saya masuk dalam tim UU Ormas dan berdiskusi tentang gagasan dengan PKS pada 2013. Ormas juga berkembang untuk mendorong kehidupan demokrasi kita dengan segala bentuknya dan perkembangannya yang hampir tanpa kontra. Bahkan MK mengatakan tidak tercatat pun ormas boleh melakukan aktivitas di publik. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kita juga telah memproduksi UU Pers, UU perse Indonesia merupakan UU Pers terbaik di Indonesia, tidak bisa diuji kecuali oleh Dewan Pers", pungkasnya.

Menurut Bahtiar, di ruang publik pun UU berpendapat, masyarakat pun bisa menguji publik ke MK. UU No 9 tahun 1998 cukup menyampaikan atau memberikan pemberitahuan ke kepolisian bukan izin. Itu, untuk memastikan hak sebagai manusia sebagai Warga Negara



terlindungi.

"Mungkin kebebasan yang tak terbatas, mereka dianggap tertuduh dianggap tidak hadir ketika dibutuhkan. Groggi ketika menggunakan UU, karena hak asasi sudah diangankan sebagai buah reformasi. Karena pada situasi tertutup jadi situasi terbuka," paparnya.

Selanjutnya, Bahtiar menjelaskan hal berikutnya yang diperlukan di negara demokrasi yakni Pemilu. Tak ada Demokrasi kalau tidak ada Pemilu. Kalau negara ini mau berhenti dari bentuk negara demokrasi ya tidak usah pemilu.

"Ini adalah bentuk kepura-puraan dalam demokrasi. Demokrasi yang berpura-pura tidak dapat menghasilkan

pemimpin yang hebat. Ke depan kita akan melakukan penyederhanaan tentang UU Parpol. UU pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada praktiknya tidak kompatibel pada wilayah-wilayah tertentu", pungkas Bahtiar.

Di akhir ulasannya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa sistem politik di Indonesia ini unik, karena menganut sistem kepartaian dengan dua pembiayaan yakni dari sumbangan anggota atau internal dan sumbangan masyarakat yang sah atau eksternal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

KURSUS SINGKAT KETAHANAN NASIONAL

PKS 2020

Grand Sahid Jaya
Jakarta, 21-23 Februari 2020



***Rasa kebangsaan
mesti dipupuk melalui
proses pembelajaran***

Mayjen TNI Andjar Wiratma
Asisten Intelijen Panglima TNI

Kami bangga PKS mengadakan kursus ketahanan nasional karena kondisi jiwa bangsa kita saat ini belum baik. Generasi muda kita pun butuh proses pembelajaran dan dialog guna memupuk kebangsaan. Kita harus cepat karena zaman sudah berubah

Soal Kedaulatan Negara, TNI Ajak Aleg PKS Turut Menjaga Kawasan Laut Indonesia

Negara kita memiliki wilayah yang sangat stratehis dimana memiliki tiga alur laut kepulauan, memiliki grand strategi di bidang maritim, serta memiliki batas maritim khususnya ZEE. Dengan wilayah yang strategis, kita bisa menjadi poros maritim dunia, tetapi memang tidak mudah, karena banyak kepentingan negara besar dan tantangan dalam menjaga kedaulatan di Laut Indonesia",

Mayjen TNI ANDJAR WIRATMA

Asisten Intelen Panglima TNI

Jakarta (23/02) — Ketahanan Nasional itu ibarat badan, setiap WNI memiliki kewajiban bela negara tanpa terkecuali. Hal tersebut diutarakan Asisten Intelen Panglima TNI Mayjen TNI Andjar Wiratma dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional yang diadakan Fraksi PKS, Jumat-Ahad, 21-23 Februari 2020.

Dalam paparan di sesi terakhir, Andjar Wiratma juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Fraksi PKS dengan mengadakan Kursus Singkat Ketahanan Nasional, karena

saat ini bangsa Indonesia sedang sakit terutama jiwanya khususnya generasi muda.

"Kita butuh proses pembelajaran dan dialog ke generasi muda, memupuk kebangsaan mereka dan semua harus dilakukan dengan cepat karena zaman sudah berubah", tuturnya.

Tak hanya itu, Andjar juga menyinggung tentang batas maritim sebuah negara yang tercantum dalam UNCLOS dimana negara punya hak menentukan batas teritorialnya dan memiliki hak eksplorasi di

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan kewajiban penjagaan dan lain sebagainya.

"Dalam konteks ini, Indonesia tidak akan melakukan perundingan dalam batas maritim dengan Tiongkok, karena tidak ada batas antara keduanya. Hanya tumpang tindih soal ZEE. Indonesia melihat klaim Tiongkok terhadap Nine Dash Line melanggar UNCLOS 82," tegasnya.

Lebih lanjut Andjar menyatakan Negara kita memiliki wilayah yang sangat stratehis dimana memiliki tiga alur laut kepulauan, memiliki grand strategi di bidang maritim, serta memiliki batas maritim khususnya ZEE.

"Dengan wilayah yang strategis, kita bisa menjadi poros maritim dunia, tetapi memang tidak mudah, karena banyak kepentingan negara besar dan tantangan dalam menjaga kedaulatan di Laut Indonesia", pungkasnya.

Untuk melindungi dan menjaga kawasan laut Indonesia, apapun perintah dari Pemerintah Pusat, TNI siap menjaga natuna menunjukkan ke dunia bahwa perairan LCS adalah



bagian dari kedaulatan Indonesia.

"Hingga kini, TNI membentuk 3 Komandan Gabungan (Kogab). Kogab 1 di barat, kogab 2 di tengah kogab 3 di timur. Disesuaikan dengan

jalur Alki. Dan yang jelas Indonesia tidak akan mengakui klaim mereka atas LCS. Tidak ada toleransi bagi kapal-kapal asing/coast guard cina di wilayah ZEE kita," tandas Andjar disertai tepuk tangan peserta.

Ketua Majelis Syuro PKS Minta Aleg Buat Ide dan Gagasan Cemerlang Bagi Rakyat

Jika berbuat baik, maka dia akan mendapat kebaikan pada diri sendiri. Dari nilai-nilai itulah seseorang akan menjadi nasionalis dan membangun ketahanan nasionalis, dengan berbuat baik

Habib Dr. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA
Ketua Majelis Syuro PKS

Jakarta (23/02) — Nilai-nilai dasar Ketahanan Nasional harus ditanamkan sejak dini, dalam kehidupan seorang muslim yang mendambakan kerukunan antar umat beragama, sebagaimana disampaikan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Salim Segaf Al-Jufri dalam Orasi Kebangsaan di acara penutupan Kursus Singkat Ketahanan Nasional Fraksi PKS se-Indonesia, Ahad, (23/02/2020).

Menurut Habib Salim, dalam Ketahanan Nasional, seorang anak bangsa harus mendahulukan kepentingan orang lain, mengutamakan

persatuan dan mencegah perpecahan.

"Jika berbuat baik, maka dia akan mendapat kebaikan pada diri sendiri. Dari nilai-nilai itulah seseorang akan menjadi nasionalis dan membangun ketahanan nasionalis, dengan berbuat baik," terang Mantan Menteri Sosial ini.

Dalam kesempatan tersebut Habib Salim juga mengapresiasi Fraksi PKS yang telah menggelar KSKN 2020, sebagai bentuk rasa cinta dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Bangun terobosan dan munculkan terus ide-ide serta gagasan, maka orang yang

mencintai negeri ini akan berbuat yang terbaik bagi kepentingan bangsa yang kita cintai, jangan buat gaduh dengan melontarkan isu kontroversial seperti ketua BPPI", pungkasnya.

Selain itu, Ketua Majelis Syuro juga mengingatkan kepada seluruh Anggota Dewan Fraksi PKS se-Indonesia yang hadir, bahwa upaya melemahkan antar anak bangsa, antar partai politik terus terjadi.

"Tapi kita tetap akan solid. Kita tetap akan satu shaff. Insyallah, Allah akan anugerahkan kemenangan pada kita di masa mendatang," tegas Habib Salim disambut pekikan takbir seluruh peserta yang hadir.

Di akhir Orasinya, Habib Salim mengingatkan kepada seluruh pimpinan dan anggota Fraksi PKS se-Indonesia untuk bisa mengerahkan segala upaya untuk kita berikan kepada masyarakat.

"Saya ingin potensi antum dimanfaatkan. Kita oposisi



tantangannya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Kita butuh kerja keras, kerja ikhlas dan kerja bersama. Buktikan

bahwa kerja kita sehingga rakyat dapat menilai", tutup Habib Salim.

BERITA FOTO



KURSUS SINGKAT KETAHANAN NASIONAL

PKS 2020 Grand Sahid Jaya
Jakarta, 21-23 Februari 2020



Pembukaan Kursus Singkat Ketahanan Nasional

Jakarta (21/02) —Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) 2020 yang bagi anggota DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kab./Kota dibuka oleh Presiden PKS Sohibul Iman pada Jumat Malam, 21 Februari 2020. Acara ini akan diikuti lebih dari 500 anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, yang akan berlangsung Jumat sampai Ahad, 21-23 Februari 2020

Sesi Materi Kepala BNPT

Jakarta (21/02) – Kepala Badan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen. Pol. Suhardi Alius, memberikan paparan materi bertema "Moderasi Kehidupan Berbangsa & Bernegara dalam Menghadapi Ancaman Terorisme" pada sesi pertama kursus singkat ketahanan nasional, Kursus Singkat ini diikuti anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kab. Kota yang dimulai pada Jumat hingga Ahad 21 - 23 Februari 2020.

Ketua Majelis Syuro Tantang Aleg lakukan yang terbaik bagi rakyat

Jakarta (23/02) — Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) 2020 yang bagi anggota DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kab./Kota telah memasuki agenda penutupan pada Ahad (23/02). Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri berkesempatan menutup acara, menantang para wakil rakyat yang hadir untuk membuat terobosan cemerlang bagi rakyat.



Bimbingan Teknis Nasional Pimpinan & Anggota DPRD PKS Se-indonesia
**KURSUS SINGKAT KETAHANAN NASIONAL
PKS 2020**

Jakarta, 21-23 Februari 2020

Sensus Online 2020

Toriq Minta Pemerintah Amankan Data Masyarakat

Diharapkan Sensus online menjadi solusi untuk memperbaiki data kependudukan di Indonesia. Mengingat data kependudukan selalu menjadi masalah klasik pada saat pemilu, pilpres dan pilkada

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (19/02) — Tahun 2020 akan menjadi tahun pertama bagi Indonesia untuk menyelenggarakan sensus penduduk secara online.

Penyelenggaraan sensus penduduk online akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari – 31 Maret 2020.

Setiap penduduk dapat mengakses website <https://sensus.bps.go.id> dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Toriq Hidayat menjelaskan Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil data masyarakat untuk kegiatan sensus. "Ini sesuai dengan Undang Undang

no 16 tahun 1997 tentang statistik, keikutsertaan setiap penduduk dalam sensus BPS bersifat wajib", ungkap Toriq.

Toriq menambahkan sistem registrasi data yang ada selama ini belum berjalan dengan optimal dan menjadi alasan utama dilaksanakan sensus online. "Diharapkan Sensus online menjadi solusi untuk memperbaiki data kependudukan di Indonesia. Mengingat data kependudukan selalu menjadi masalah klasik pada saat pemilu, pilpres dan pilkada," terang Toriq.

Lebih lanjut Toriq berharap sensus online ini jadi solusi untuk memperbaiki data kependudukan sehingga saat Pemilu, pilpres dan pilkada

dikemudian hari, data kependudukan tidak lagi bermasalah.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Sulitnya keterjangkauan akses terhadap infrastruktur bagi pulau-pulau terluar di Indonesia menjadi salah satu tantangan tersendiri.

"Jumlah belasan ribu pulau, gunung-gunung, ketebalan hutan dan letak geografis. lebih dari 149.400 titik layanan publik yang mengalami kekurangan konektivitas, bahkan ada yang mengalami blank spot (tidak ada sinyal) adalah tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Sensus online Tahun ini", ungkap Toriq.

Toriq menambahkan perlu kesiapan infrastruktur yang memadai agar sensus penduduk tahun ini berjalan normal. Pemerintah juga harus mengantisipasi jika kendala teknis yang mungkin saja akan timbul.

"Belum lagi Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang yang bermuara



kepada aksi penipuan atau tindak kriminal di dunia cyber atau cyber crime", pungkasnya.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) usulan pemerintah akan segera diselesaikan bersama DPR. Toriq berharap RUU PDP dapat memberi perlindungan kepada masyarakat yang memberikan

data pribadi kepada Pihak lain.

"Walaupun sistem data kependudukan dikatakan aman. Namun menurut saya, Pemerintah harus memastikan agar data pribadi masyarakat tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab", tutup Toriq.

Foto : dpr.go.id

Penerbitan RIPH Harus Sesuai Prosedur, Permainan Perizinan Bisa Berdampak Buruk

Saya meminta, pemerintah sesuai prosedur saja ketika memberikan RIPH apapun komoditasnya. Kita tidak mengetahui dampak besar yang menunggu bila pejabat bermain-main untuk sebuah regulasi. Ujung-ujungnya, masyarakat yang mendapat getah paitnya

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (21/02) — Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin, dampak buruk tata niaga produk pangan terutama hortikultura diawali dari proses rekomendasi perizinan impor yang manipulatif. Pengusaha maupun pejabat penerbitan izin mesti diterbitkan, bila perlu KPK turun tangan mengusut tuntas pelaku perusak tanaman kenegaraan kita di sektor hortikultura ini.

"Saya menengarai banyak prosedur yang dilanggar Kementerian Pertanian dalam pemberian rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk komoditas bawang putih ini. Efeknya berantai mulai dari penerbitan

hingga mengkormesialisasi lembaran rekomendasi izin ini", kata Politisi PKS ini.

Menurut data yang dihipunkannya, banyak perusahaan baru yang dapat rekomendasi, tetapi tidak ikut persyaratan mutlak RIPH. Saat rapat dengar pendapat (RDP) Kementerian dengan DPR, Dewan mengungkapkan banyak kejanggalan. Dia berharap pengawas hukum seperti KPK menyelidiki ini.

"Jangan sampai jual beli kuota saja. Ini hanya modal selembarnya persetujuan RIPH itu bisa dijual ke mana-mana. Ini membuat pangan kita enggak terkontrol. Kami ingin yang

impor disaring," kata Andi Akmal kepada wartawan.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyayangkan, saat ini pemerintah berkecenderungan pada satu perusahaan importir saja ketika mengeluarkan rekomendasi Impor produk hortikultura. Akibatnya, lanjut dia, selain menimbulkan kecemburuan dari pelaku usaha yang sama, juga menimbulkan kecurigaan. Dampak lainnya adalah adanya jual beli kuota di lapangan.

Salah satu kejanggalannya, tambah Akmal, ada satu perusahaan yang mengantongi izin impor lebih dari 11 ribu ton bawang putih. Sedangkan perusahaan-perusahaan lain, tidak sampai 500 ton.

"Ada ketimpangan berlebihan pada pemegang RIPH untuk komoditas bawang putih. Jadi kalo sekarang ketika ada masalah sedikit saja, harga komoditas sangat sensitif terhadap harga. Bukti nyatanya, kenaikan harga bawang putih yang naik hingga tiga kali lipat", urai Akmal.

Akmal mengatakan, meskipun pemerintah saat ini perlu melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pengajuan



SPI (Surat Perizinan Impor), namun pemeriksaannya terlalu lambat. Sebagai gambaran yang terjadi saat ini, ada sekitar 100 perusahaan yang mengajukan RIPH, namun baru 13 saja yang sudah keluar rekomendasinya. Bahkan kementerian perdaganganpun sudah mengakui, bahwa saat ini baru 62.000 ton bawang putih yang lolos pengajuan Surat Perizinan Impor (SPI) dari kuota 103.000 ton yang diberikan Kementan.

"Saya meminta, pemerintah sesuai prosedur saja ketika memberikan RIPH apapun komoditasnya. Kita tidak mengetahui dampak besar yang menunggu bila pejabat bermain-main untuk sebuah regulasi. Ujung-ujungnya, masyarakat yang mendapat getah paitnya", tutup Andi Akmal Pasludin.

Slamet Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Ekonomi Petani, Peternak & Nelayan

Di satu sisi kita semua mengetahui bahwa ada banyak perusahaan swasta konglomerat yang semakin meroket, hingga masuk menjadi orang atau perusahaan terkaya kelas dunia. Tapi sayangnya, saya tidak melihat adanya tanggungjawab sosial atau CSR perusahaan tersebut bagi masyarakat

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (20/02) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet menyoroti perkembangan ancaman kemiskinan yang melanda keluarga petani, peternak, dan nelayan.

Legislator asal Sukabumi tersebut mengatakan, petani menghadapi dilema harga pangan yang tidak bebas ditentukan oleh pasar, tapi dikendalikan oleh pemerintah melalui operasi pasar dan produk impor, meski tidak bermutu karena harganya murah.

"Nelayan menghadapi

dilema mahalunya ongkos melaut, menghadapi berbagai aturan dan menghadapi perusahaan besar termasuk BUMN perikanan. Peternak juga menghadapi dilema kekurangan modal, menghadapi fluktuasi harga yang ditentukan oleh perusahaan pemborong dan ongkos produksi yang mahal, sehingga tidak sanggup bersaing dengan perusahaan peternak besar yang ikut melakukan budidaya meskipun melanggar aturan Perundang-undangan," jelas Slamet, Kamis (20/02/2020).

Akibatnya, lanjut Slamet,

tidak sedikit keluarga petani, peternak dan nelayan yang kehidupan ekonominya semakin miskin. Padahal, jumlah mereka besar. Dalam kondisi yang seperti itu, Slamet mempertanyakan di mana kehadiran pemerintah.

"Pemerintah seperti kekurangan anggaran untuk bisa membantu mereka melalui program yang tepat untuk menaikan taraf hidupnya. Akibatnya, mereka selalu menjadi masyarakat pinggiran yang besar," tambah Slamet.

Slamet mengungkapkan, di satu sisi kita semua mengetahui bahwa ada banyak perusahaan swasta konglomerat yang semakin meroket, hingga masuk menjadi orang atau perusahaan terkaya kelas dunia. Tapi sayangnya, sambung Slamet, dirinya tidak melihat adanya tanggungjawab sosial atau CSR perusahaan tersebut bagi masyarakat.

"Ternyata CSR mereka dikelola oleh perusahaan konglomerat juga, sebutlah PT Sampoerna Foundation. Tahun 2016 saja, mereka sudah



mengelola dana CSR dari 200 perusahaan. Ke mana itu arahnya? Yang jelas, petani, peternak, dan nelayan masih mengalami kebangkrutan dari usahanya," imbuh Slamet.

Terakhir Slamet menyebut, dirinya mengimbau pemerintah agar mengarahkan dana CSR perusahaan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan petani, peternak, dan nelayan melalui pemberian peralatan

yang dibutuhkan, iptek dan akses pasar yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

"Hal itu bisa ditempuh melalui program subsidi harga yang bisa tetap menjaga keuntungan usaha petani, ketika harga berada di bawah harga pasar, demi menjaga keberlangsungan usaha mereka," tandasnya.

Johan Rosihan Usulkan Beasiswa Khusus Anak Petani

kebijakan ini terarah pada peningkatan kualitas SDM pertanian dengan cara membentuk regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian.

H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (18/2) Anggota Komisi IV DPR RI dari FPKS Johan Rosihan mengusulkan beasiswa khusus anak petani kepada pemerintah. Hal ini berdasarkan visi Presiden RI tentang SDM Unggul dan Indonesia Maju. .

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa kebijakan ini terarah pada peningkatan kualitas SDM pertanian dengan cara membentuk regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian. Lebih jauh, Johan menjelaskan bahwa saat ini sektor Pertanian telah menyumbang sebagai kontributor terbesar kedua dalam PDB. "Sebesar 14% dalam rata-rata distribusi PDB kita dan saat ini jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor Pertanian berjumlah 35,16 juta orang. Menjadi tantangan pemerintah ke depan

untuk fokus pada pengembangan SDM Pertanian berbasis keluarga petani" tegas Johan, Selasa (18/2)

Menurut Anggota DPR RI Dapil NTB 1 ini bentuk konkrit dukungan pemerintah terhadap keluarga petani dan peningkatan kualitas SDM petani adalah dengan realisasi program beasiswa khusus anak petani. Beasiswa ini akan menjadi pemicu semangat petani agar keluarganya memiliki Pendidikan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih meningkat.

"Pemerintah mesti mewaspadai fenomena adanya jumlah penduduk yang bekerja di sektor Pertanian yang terus menurun dari 39,22 juta pada 2013 menjadi 38,97 juta pada 2014. Jumlahnya turun lagi menjadi 37,75 juta pada 2015,

hingga saat ini terus turun sampai berjumlah sekitar 35,16 juta orang saja, sementara dari sisi usia rerata petani semakin tua dan generasi muda merosot minatnya menjadi petani" urai Johan.

Johan mengingatkan bahwa adanya program pemerintah tentang Pertanian masuk sekolah jangan hanya dijadikan sebatas jargon atau kegiatan simbolik saja. Ia mencermati, bahwa tanpa ada kesiapan konsep, kesiapan sarana prasarana, kesiapan kurikulum dan muatan lokal, serta kesiapan pengkondisian sekolah untuk memahami dunia pertanian secara utuh, maka akan terjadi dis-efisiensi program "Sebagai contoh nyata adalah tidak efektif dan efisiennya tenaga pendidik pertanian, lahan percobaan dan laboratorium pertanian dalam pencapaian cita-cita bangsa seperti swasembada pangan" ujar Johan.

Kondisi petani kita saat ini sangat memprihatinkan. Kondisi ini memerlukan penyelesaian pembuatan program yang berorientasi pada keberpihakan kepada keluarga petani di sekolah, seperti



program beasiswa khusus anak petani, program anak petani yang berprestasi di sekolah dan lain sebagainya.

Pada paradigma pertanian saat ini, tambah dia, mesti diterjemahkan dalam kebijakan dan serangkaian program-program pembangunan yang pro pada keluarga petani. Sangat penting bagi kita semua, bahwa pertanian tidak identik dengan kemiskinan. Johan mencontohkan bahwa negara-negara lain banyak yang hidup makmur karena memiliki sistem pertanian yang kuat.

"Negara-negara tetangga kita seperti Thailand, Cina, dan

Malaysia dapat berjaya dengan produk pertaniannya. Demikian pula Amerika Serikat, hingga kini tetap menjadi eksportir pangan-pangan utama ke berbagai negara. Pertanian di negara kita memiliki potensi pertumbuhan tertinggi bagi pemberantasan kemiskinan dalam jangka pendek dan menengah yang memiliki wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduknya petani dan kehidupan keluarganya tergantung kepada pertanian", tutup Johan Rosihan.

Foto : dpr.go.id

DPR: Omnibus Law Cipta Kerja Jangan Merusak Lingkungan

“Saya akan berjuang untuk tetap memastikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan berbagai instrumen perlindungan lingkungan lainnya seperti KLHS menjadi dasar dalam terbitnya izin usaha”

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (16/2) Anggota DPR RI, Komisi IV, Hamid Noor Yasin mengingatkan agar regulasi berkaitan dengan kerusakan lingkungan cermat pada penyusunan maupun praktiknya. Menurutnya, Jangan sampai undang-undang yang selama ini baik jadi tereliminasi. Bahkan bila perlu undang-undang yang belum diterapkan harus dipertegas untuk melindungi segala ancaman kerusakan lingkungan.

Politisi PKS ini mengatakan bahwa undang-undang omnibus law diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuhnya investasi dalam negeri. Contohnya pada Undang-

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini merupakan salah satu Undang-undang yang akan dimasukkan dalam Omnibus Law.

“Saya mengingatkan agar Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak merusak lingkungan hidup dan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan”, tegas dia.

Legislator asal Jawa Tengah IV ini menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi tanpa mengindahkan lingkungan akan membuat lingkungan rusak dan mengancam kepentingan generasi yang akan datang. Nilai pembangunan berkelanjutan merupakan

aturan dasar yang merujuk pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945, yang berbunyi : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembuatan kebijakan, lanjut Hamid, sangat penting mendasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Jika asas ini dilanggar, berbagai masalah akan muncul ke depannya.

“Penyebab utama terjadinya banjir dan kekeringan panjang adalah perilaku kegiatan ekonomi dengan praktik pembukaan areal hutan yang berada di kawasan hulu. Misal, pembangunan Villa, tempat wisata yang mengurangi kualitas lingkungan dengan banyak mengkonversi area pohon dan hutan menjadi area pembangunan. Kegiatan atau perilaku ini, dimasa yang akan datang akan menimbulkan



penyesalan karena biaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi lebih besar dari yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi”, urai Hamid.

Menurut Hamid, Fraksi PKS akan menjadi garda depan untuk mengawal agar Undang-undang Cipta Kerja yang dihasilkan akan tetap memuat berbagai instrumen perlindungan lingkungan. Bila rencana kelola dan rencana pemanfaatan lingkungan

tersedia dan dipatuhi, investasi akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan, bermanfaat untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang.

“Saya akan berjuang untuk tetap memastikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan berbagai instrumen perlindungan lingkungan lainnya seperti KLHS menjadi dasar dalam terbitnya izin usaha”, tutup Hamid Noor Yasin.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Untuk Dapat Kepercayaan, BUMN Asuransi Perlu Berbenah Pasca Skandal Jiwasraya

Saya berharap, ada komitmen bersama seluruh BUMN Asuransi pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), pedoman perilaku (code of conduct) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Hj. Nevi Zuairina

Anggota Komisi VI DPR RI

Untuk Dapat Kepercayaan, BUMN Asuransi Perlu Berbenah Pasca Skandal Jiwasraya

Saya berharap, ada komitmen bersama seluruh BUMN Asuransi pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), pedoman perilaku (code of conduct) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (20/02) — Anggota DPR Komisi VI, Nevi Zuairina pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh direksi BUMN Asuransi, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Taspem (Persero), PT Asabri (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), meminta dengan tegas agar kasus seperti Jiwasraya adalah pertama dan terakhir.

Menurut Nevi hal tersebut didasari karena merugikan nasabah dengan angka fantastis dan telah mencoreng bangsa kita di mata dunia berkaitan

dengan integritas kepercayaan terhadap kejujuran.

"Saya selalu berdo'a, semoga seluruh BUMN Asuransi tidak mengalami lagi kejadian seperti Jiwasraya. Terutama Asabri, semoga tidak terjerumus seperti Jiwasraya ya. Kepercayaan publik terhadap asuransi milik negara saat ini sangat berkurang drastis akibat adanya kasus jiwasraya", tukas Nevi.

Lebih lanjut, Politisi PKS ini menyoroti berbagai persoalan yang kerap terjadi pada BUMN Asuransi seperti Kekurangan cadangan teknis dan kesalahan investasi. Kedua isu penting pada per-asuransian ini sangat besar potensi terjadi akibat missed management dan fraud.

Persoalan cadangan teknis

yang Legislator PKS ini maksud adalah terkait direktorat yang mengelola perlu kejelasan. Kredibilitas dan pertanggungjawaban yang dapat ditunjukkan berupa indikator pengukuran yang jelas sehingga DPR dan masyarakat Indonesia dapat yakin dan percaya.

Legislator asal Sumatera Barat tersebut meminta kepada direksi untuk menjelaskan komposisi portofolio investasi saat ini sehingga anggota DPR dan rakyat Indonesia mampu mengetahui keadaan investasi yg ada kredible dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Nevi, penjelasan ini akan lebih komprehensif bila direksi memberikan rincian dan racikan investasi di portofolio reksadana, obligasi, dan keikutsertaan pada anak-anak perusahaan.

"Saya berharap, ada komitmen bersama seluruh BUMN Asuransi pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), pedoman perilaku (code of conduct) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," urai Nevi.

Nevi Melanjutkan,



komitmen BUMN Asuransi ini, bila konsisten dilakukan, maka institusi-institusi ini akan menjadi agen pembangunan yang bisa menggerakkan perekonomian lokal maupun nasional.

"Namun semua komitmen ini perlu dibarengi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan investasi dan manajemen portofolio", ungkapnya.

Khusus pada Jasa Raharja, Nevi menyoroti masih belum maksimalnya transformasi digital pada sistem pembayaran santunan yang real time. Nevi juga menyarankan agar Jasa

Raharja mampu mengoptimalkan promosi pemasaran dan sosialisasi tentang produk asuransi dengan menggunakan teknologi digital sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0.

"Seperti keputusan rapat, semoga seluruh BUMN Asuransi memberikan jawaban secara cepat sehingga menjadi bahan masukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN. Upaya ini sangat penting untuk membangun regulasi dan pengawasan menuju pemerintahan yang handal", tutup Nevi Zuairina.

DPR Kritisi Efektifitas KUR Bank BUMN terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pak Erick Thohir saya rasa harus betul-betul memperhatikan ini, jangan sampai Program KUR dengan jumlah dana yang ratusan triliun ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (21/02) — Efektifitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank BUMN atau yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dinilai belum efektif mendokrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi VI Chairul Anwar di ruang rapat Komisi VI saat rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (20/02/2020).

“Saya mengkritisi efektifitas KUR yang disalurkan oleh HIMBARA yang kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut paparan HIMBARA yang disampaikan sewaktu kunjungan spesifik Komisi VI yang lalu, total penyaluran KUR HIMBARA tahun 2019 sebesar 130,7 triliun rupiah, hal itu naik

dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 120 triliun rupiah tahun 2018 dan 96,7 triliun Tahun 2017,” ungkap Chairul.

Seperti diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia di Jaman pemerintahan Jokowi stagnan di angka 5 %, bahkan Tahun 2019 turun menjadi 5,02% dimana tahun 2018 sebesar 5,17%.

Menurut Chairul ada beberapa hal yang menyebabkan kurang efektifnya KUR yang disalurkan Bank BUMN.

“Faktor yang menyebabkan kurang efektifnya KUR terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah komposisi penyaluran KUR sektor produksi yang masih dibawah target. Target Tahun 2019 penyaluran sektor produksi hanya 52% dari target 60%. Kedepan KUR

sektor produksi harus digenjut lagi karena hal itu lah yang diharapkan mampu menggenggam laju perekonomian,” jelas Anggota DPR RI dari Dapil Riau ini.

Menurut Chairul Menteri BUMN harus serius memperhatikan hal ini, “Pak Erick Thohir saya rasa harus betul-betul memperhatikan ini, jangan sampai Program KUR dengan jumlah dana yang ratusan triliun ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegas Chairul.

Selain itu politisi PKS ini juga menyoroti kurang meratanya penyaluran KUR di seluruh Indonesia.

“Kurang meratanya KUR juga bisa menjadi penyebab kurang efektifnya program KUR terhadap pertumbuhan ekonomi, data yang ada penyaluran KUR di dominasi di Pulau Jawa lebih dari setengah KUR disalurkan hanya di pulau jawa yaitu di angka 54,35%, selebihnya tersebar di luar jawa. Ini kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Saya berharap ke depan Pak Menteri Erick meningkatkan persentase penyaluran KUR ke luar Jawa agar ekonomi di luar Jawa bisa bergerak juga,” tutup Chairul.



PKS Minta Peran Kelembagaan BATAN Diperkuat

Batan memiliki mandat untuk menggencarkan promosi pengembangan tenaga nuklir dan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif dalam berbagai aspek pembangunan, baik dalam bidang industri, pertanian, kesehatan, pangan maupun energi

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta, (18/2) Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS Mulyanto minta peran kelembagaan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) diperkuat. Hal ini karena karena ramainya kasus tercemarnya limbah radioaktif di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Sebagai Badan Pelaksana ketenaganukliran di Indonesia sudah sepatutnya peran Batan ditingkatkan dalam melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir, radiasi dan zat radioaktif pada berbagai bidang pembangunan.

Sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran, Batan secara kelembagaan harus ditempatkan lebih utuh dan tidak sekedar menjadi lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) IPTEK nuklir. Kalau sekedar lembaga litbang, Batan dapat dilebur kedalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yg strukturnya kini tengah digodok oleh Menristek.

"Batan memiliki mandat untuk menggencarkan promosi pengembangan tenaga nuklir dan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif dalam berbagai aspek pembangunan, baik dalam bidang industri, pertanian, kesehatan, pangan

maupun energi," jelas Mulyanto, Selasa (18/2).

Adanya kasus tercemarnya limbah radioaktif belum lama ini harusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki peran dan fungsi kelembagaan Batan. Perbaikan jangan hanya fokus pada kasus kecil tapi harus dikerjakan sekaligus untuk meningkatkan peran dan fungsi Batan.

"Saat ini sudah banyak negara maju dan berkembang yang memanfaatkan nuklir untuk berbagai keperluan. Indonesia juga harusnya sudah bisa melakukan yang sama. Pemerintah jangan sia-siakan sumber daya yang ada di Batan," ujar politisi yang juga doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology, Jepang.

Batan, menurut Mulyanto harus aktif melakukan sosialisasi pemanfaatan tenaga nuklir. Sehingga masyarakat paham, tercerahkan serta dapat mempersepsikan secara tepat manfaat nuklir. Dengan begitu, masyarakat dapat menerima dan tidak menimbulkan polemik.



Wacana Sertifikasi Khatib Bisa Memecah Belah Umat

“Saya berpendapat ulama, para dai, pastur, pendeta dan pemuka setiap agama, negara harus memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan terminologi agama yang sebenarnya menurut agamanya masing-masing

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (20/02) — Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Iskan Qolba Lubis menanggapi wacana yang dilontarkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pada Rabu (19/02) tentang sertifikasi Khatib.

Menurut Iskan, hak berbicara itu merupakan hak asasi manusia, juga dilihat secara terminologi agama islam, bahwa setiap orang harus berdakwah dan merupakan kewajiban personal setiap muslim, maka negara tidak boleh masuk dalam hal terminologi agama tersebut.

“Makanya wacana tersebut menurut saya akan menimbulkan kedepannya pembatasan-pembatasan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau

tujuannya pelatihan atau pengembangan kapasitas ustaz atau khatib, saya setuju.” tegas Iskan.

Di sisi lain Iskan juga mewanti-wanti, jika ada ulama yang bersertifikasi, kemudian ada ulama yang tidak bersertifikasi, itu nanti di lapangan akan terjadi pembelahan umat.

“Saya khawatir akan terbentuk konotasi adanya ulama yang pro pemerintah atau kontra dengan pemerintah,” pungkasnya.

Jadi, lanjut Iskan, biarkan saja, karena seleksi alam itu akan berlaku secara alami, kalau seumpama orang-orang yang tampil di tengah masyarakat tersebut kasar penyampaiannya, radikal, maka tidak akan dipakai oleh masyarakat.

“Saya berpendapat ulama, para dai, pastur, pendeta dan pemuka setiap agama, negara harus memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan terminologi agama yang sebenarnya menurut agamanya masing-masing,” tegas Iskan.

Maka kami, kata Iskan, dari Fraksi PKS DPR RI sedang merancang dan mengusulkan RUU perlindungan Tokoh agama dan simbol agama dan itu bukan hanya islam saja, tapi seluruh agama yang diakui dikonsitusi kita.

“Hal itu dilakukan agar para da'i, pastur, pendeta dan sebagainya bebas menyampaikan dakwahnya sesuai tuntunan agama masing-masing,” tutup Iskan.



Foto : dpr.go.id

Bukhori Dorong Kementerian PPPA Miliki Satker Ketahanan Keluarga

“Lembaga pemerintah seperti kementerian maupun instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap isu perlindungan anak dan keluarga tidak boleh bekerja secara terpisah (parsialistik). Perlu ada kerja kolektif yang terkoordinasi antar lembaga sehingga mampu menyentuh akar permasalahan yang terjadi di masyarakat ini

KH. BUKHORI, Lc., M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (19/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyatakan bahwa perilaku penyimpangan moral dan seksual pada anak, pelanggaran hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pornografi, dan bentuk kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan sebenarnya bermuara dari keluarga.

Menurutnya angka dari kasus-kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Pada dasarnya, ketahanan keluarga Indonesia yang masih rapuh adalah muara dari permasalahan yang melibatkan anak dan keluarga. Sebagai contoh, berdasarkan laporan yang dirilis KPAI tahun 2019, kasus pelanggaran hak anak mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 terjadi sebanyak 4.579 kasus bertambah menjadi 4.885 kasus pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut kasus anak yang berhadapan dengan

hukum (ABH) menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus disusun dengan kasus terkait dengan keluarga yang mencapai 857 kasus. Selain itu menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 14% dari tahun sebelumnya dimana jenis kekerasan yang paling menonjol adalah KDRT, dengan angka mencapai 9.637 kasus,” ujar Bukhori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di ruang komisi VIII DPR RI di Senayan, Rabu, (19/02/2020).

Bukhori menambahkan setiap kementerian atau lembaga pemerintah terkait yang bertanggungjawab menangani isu perlindungan anak dan keluarga tidak boleh bekerja secara parsialistik dan perlu bersinergi sehingga menjadi leading sector dalam menyentuh akar permasalahan tersebut. Selain itu, politisi PKS tersebut juga mengusulkan



wacana penguatan lembaga di KPPPA.

“Lembaga pemerintah seperti kementerian maupun instansi terkait yang bertanggungjawab terhadap isu perlindungan anak dan keluarga tidak boleh bekerja secara terpisah (parsialistik). Perlu ada kerja kolektif yang terkoordinasi antar lembaga

sehingga mampu menyentuh akar permasalahan yang terjadi di masyarakat ini. Disamping itu, lembaga KPPPA juga perlu diperkuat dengan membentuk Satker Deputy Bidang Ketahanan Keluarga agar kinerja kementerian mampu lebih optimal” tegas Bukhori.

Foto : dpr.go.id

Pasca Observasi, Netty Himbau Pemerintah Fokus Mencari Solusi Lanjutan

Pemerintah perlu mengecek kondisi WNI di setiap negara sebaran Corona. Pastikan setiap KBRI siap membuka layanan cepat tanggap dan melakukan penjangkauan WNI yang bekerja baik di kapal pesiar, tempat, dan negara lokasi endemik demi memberikan perlindungan

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta - Setelah mengunjungi WNI dari Wuhan yang diobservasi di Natuna, Kamis (13/2), Netty Prasetyani, Wakil Ketua FPKS DPR RI, mengapresiasi kesiagaan Kementerian Kesehatan dalam penanganan karantina.

"Mekanisme observasi sesuai standar WHO sudah usai dan 238 WNI dinyatakan sehat. Kita apresiasi kerja bersama yang dilakukan elemen pemerintah," ungkap Netty.

Politisi PKS dari dapil Kokab Cirebon dan Indramayu ini selanjutnya menghimbau

pemerintah untuk fokus pada solusi permasalahan yang timbul. "Upaya lanjutan harus dilakukan. Pertama, saya berharap tidak ada stigma negatif dan diskriminasi terhadap warga yang sudah selesai menjalani observasi. Terima mereka dengan baik, jangan dijauhi," tambah Netty.

Kedua, lanjut Netty, "Sebagian besar mereka adalah mahasiswa. Perlu dipikirkan bagaimana kelanjutan studi mereka. Apakah dimungkinkan kembali ke Wuhan atau melanjutkan di tanah air.

Pemerintah melalui Kemenlu dan Kemendikbud dapat memfasilitasi akses kelanjutan studi mereka", ujar Netty.

Dan yang tidak kalah penting, kata Netty, bagaimana kemampuan pemerintah menyelenggarakan penatalaksanaan observasi WNI dari lokasi endemik, dibarengi upaya melindungi WNI yang ada di luar negeri khususnya yang menjadi sebaran Covid 19.

"Pemerintah perlu mengecek kondisi WNI di setiap negara sebaran Corona. Pastikan setiap KBRI siap membuka layanan cepat tanggap dan melakukan penjangkauan WNI yang bekerja baik di kapal pesiar, tempat, dan negara lokasi endemik demi memberikan perlindungan," kata Netty.

Untuk itu, Netty menghimbau pemerintah tidak lengah oleh pujian. "Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Negara harus benar-benar hadir memberikan pelayanan bagi rakyat dimanapun berada", tutup Netty.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Penduduk Lokal

Kehadiran investor swasta, baik dari dalam atau luar negeri, seyogyanya tidak boleh 'meninggalkan' masyarakat lokal. Bahkan, masyarakat sekitar kawasan wisata harus mendapat prioritas dan kepastian dalam hal menikmati dampak ekonominya

Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M., M.Ed.
Anggota Komisi X DPR RI

PKS: Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Penduduk Lokal

Menjadikan pengembangan obyek wisata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pengembangan kualitas insani. Pemerintah harus juga mendukung pengembangan lembaga Pendidikan yang sarat akan kepentingan menyiapkan insan-insan penyelenggara, pengelola dan pendukung wisata

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed.

Anggota Komisi X DPR RI

Manggarai (17/2) Anggota Komisi X Fahmy Alaydroes saat mengunjungi destinasi wisata super prioritas, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah dalam mengembangkan daerah wisata memperhatikan kearifan dan kesejahteraan penduduk lokal.

"Kehadiran investor swasta, baik dari dalam atau luar negeri, seyogyanya tidak boleh 'meninggalkan' masyarakat lokal. Bahkan, masyarakat sekitar kawasan wisata harus mendapat prioritas dan kepastian dalam hal menikmati dampak ekonominya. Jangan

sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton belaka, dan akhirnya mereka tetap miskin dan merana." Disampaikan dalam rapat kunjungan kerja Anggota Komisi X DPR RI dengan para pemangku kepentingan antara lain Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula maupun Presdir Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Shana Fatina di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Fahmi juga menyampaikan beberapa catatan terkait arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, sejak awal harus dipastikan, bahwa arah kebijakan pengembangan

wisata yang menggunakan dana APBN triliunan rupiah ini harus memberi kemaslahatan kepada masyarakat dan negara, bukan hanya investor belaka.

"Menjadikan pengembangan obyek wisata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pengembangan kualitas insani. Pemerintah harus juga mendukung pengembangan lembaga Pendidikan yang sarat akan kepentingan menyiapkan insan-insan penyelenggara, pengelola dan pendukung wisata" Ulas fahmy.

SMK Kepariwisataan, Politeknik Kepariwisataan, Lembaga-lembaga dan pusat-pusat pelatihan kursus industri kreatif, kerajinan dan kuliner khas daerah setempat seharusnya dibangun dan dikembangkan di setiap wilayah atau kawasan Wisata Prioritas atau Super Prioritas.

Pemerintah telah menggelontorkan dana ratusan miliar agar kelak kawasan ini menjadi destinasi wisata yang memenuhi standar kelas dunia dalam hal Aksesibilitas yang mudah, Atraksi yang menarik, Aktivitas yang aman, nyaman dan menyenangkan, Akomodasi yang memadai, bersih, dan har-



ga yang pantas, dan Amenitas yang lengkap sesuai kebutuhan pengunjung. (Formula 5A).

Anggota Fraksi PKS ini juga berpesan agar menjaga, merawat dan memelihara ekosistem dan orsinalitas natural kawasan, sehingga tetap menjadi warisan kekayaan alami yang seimbang dan harmoni. Jangan sampai merubah atau merusak ekosistem.

Memperhatikan dampak lingkungan terhadap kawasan destinasi, terutama dalam hal sampah, kerusakan ekosistem, dan juga kerusakan lingkungan sosial atau budaya akibat dari maraknya perilaku dan budaya pendatang yg tidak baik, atau

tidak sesuai dengan budaya lokal.

"Pengembangan destinasi wisata, buka hanya melulu memberikan dampak positif bagi perekonomian tapi juga pembangunan di daerah kawasan destinasi, kemajuan pembangunan manusia sekitar kawasan destinasi, konservasi lingkungan, dan kemajuan budaya masyarakat lokal" pungkas Fahmi.

Sebagai informasi, sampai saat ini Labuan Bajo masih dalam tahapan pembangunan, Labuan Bajo direncanakan akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 di tahun 2023 mendatang.

Penutupan SMP Muhammadiyah di Purworejo Bukan Solusi

“Kalau karena satu kasus lantas sekolah inklusif ini harus ditutup, maka bisa menghilangkan hak-hak anak disabilitas lain di sekitar wilayah itu

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (19/02) — Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih menayangkan rencana Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang akan menutup SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo menyusul aksi perundungan terhadap seorang siswi berkebutuhan khusus oleh tiga teman sekelasnya di sekolah tersebut.

“Penutupan sekolah bukan solusi, masalah bullying atau perundungan adalah masalah bersama yang dapat muncul lagi di kemudian hari, mau berapa sekolah ditutup?” ucap politisi PKS ini di Jakarta, Rabu (19/2).

Fikri menambahkan, masalah perundungan adalah fenomena yang perlu mendapatkan solusi komprehensif dan berkelanjutan, melalui program yang massif dan didukung seluruh pihak, baik

sekolah, wali murid, hingga pemerintah daerah sebagai penyelenggara kebijakan di tingkat lokal. “Bukan hanya karena ada kasus atau insidental saja,” imbuh dia.

Di samping itu, hasil investigasi internal dewan pimpinan pusat Muhammadiyah yang turun langsung menyusul timbulnya kasus tersebut, menemukan bahwa tiga anak pelaku perundungan adalah siswa baru pindahan yang ditransfer dari sekolah lain.

“Tidak adil rasanya bila serta merta kesalahan ditimpakan kepada SMP Muhammadiyah Butuh,” ujar Fikri.

Lebih jauh, Fikri menilai justru SMP Muhammadiyah Butuh hanya sedikit diantara banyak sekolah yang bersedia menjadi sekolah inklusif.

“Kita mesti apresiasi

dengan hadirnya SMP Muhammadiyah Butuh sebagai sekolah inklusif, padahal perundungan mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menunjuk minimal setidaknya satu sekolah inklusi di tiap jenjang pendidikan pada tiap kecamatan,” tambahnya.

Seperti diketahui, sekolah inklusi adalah sekolah yang menerapkan kesetaraan terhadap siswa disabilitas, sehingga dapat belajar bersama di kelas reguler bersama-sama teman seusianya yang normal, tanpa harus dikhususkan kelasnya.

“Kalau karena satu kasus lantas sekolah inklusif ini harus ditutup, maka bisa menghilangkan hak-hak anak disabilitas lain di sekitar wilayah itu,” ucap Fikri.

Fikri meminta, dengan terjadinya kasus perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus oleh temannya yang normal, janganlah dijadikan alasan penutupan sekolah inklusi.

“Inilah tantangannya, anak disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara yang berhak memperoleh pendidikan dengan anak lain



yang normal, sesuai Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,” kata Fikri.

Selain itu, Fikri mengkritik soal kewenangan pemerintah Provinsi khususnya, Jawa Tengah yang melampaui tupoksinya. Menurutnya, sesuai Undang Undang Nomor 23 thn 2014, sebaiknya masalah SMP Muhammadiyah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo.

“Gubernur bisa memberi saran dan masukan. Pemerintah provinsi sebaiknya

konsentrasi membenahi SMA/K sesuai kewenangan yang diamanahkan,” tegasnya.

Namun kemudian, masalah perundungan memang sudah menjadi masalah nasional yang terjadi bisa kepada siapa saja tanpa pandang bulu.

“Menjadi tugas bersama bagi kita semua, terlebih pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi problem bullying khususnya di institusi pendidikan agar tidak terus terulang,” tutup Fikri.

Foto : dpr.go.id

PKS Kritik Usulan Pembangunan Gedung Baru Kemendikbud di Jakarta

mengapa pembangunan gedung baru harus di Jakarta, bukan di lokasi ibu kota baru. Apalagi, pembangunan gedung itu menggunakan dana yang tidak sedikit. Itu sekian ratus miliar

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta -Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa membeberkan rencana pembangunan gedung kementerian baru di Jakarta. Menurutny, hal itu bertolak belakang dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu ia beberkan dalam diskusi hasil survei nasional Indobarometer berjudul 'Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin'.

"Lucunya nih di dalam pembahasan Komisi X misalnya untuk APBN 2020 ada usulan untuk membangun salah satu gedung berlantai 4 untuk salah satu kementerian mitra komisi X dan itu letaknya di Jakarta, nggak di sana (Kaltim)," ujar

Ledia di Ksatria Arya Wira Room, Hotel Century Park Senayan, Jakarta, Minggu (16/2).

Ledia heran mengapa pembangunan gedung baru harus di Jakarta, bukan di lokasi ibu kota baru. Apalagi, pembangunan gedung itu menggunakan dana yang tidak sedikit. "Itu sekian ratus miliar," kata Ledia.

Menurutnya, tidak ada koordinasi antara para menteri dengan Jokowi. Ia menyarankan agar Jokowi dan menteri-menterinya melakukan pembahasan yang mendalam terkait program-program yang ada.

"Maksud saya ini kan mustinya menteri-nya, para menteri-nya juga stick dong kalau mau bikin (gedung baru),

mau mendukung presidennya lihat juga dong program yang ada," tuturnya.

Ledia tidak menjelaskan secara rinci fungsi dari gedung tersebut. Pembawa acara pun langsung menanyakan kementerian mana yang dimaksud Ledia.

"Kementerian apa?" tanya pembawa acara. "Sebutin nggak ya.. Kementerian Pendidikan & Kebudayaan," ungkap Ledia.

Diketahui, pemerintah tengah menggarap proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Bahkan, Jokowi menargetkan pada tahun 2024 semua kementerian/lembaga di pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru di Kaltim.

Foto : Gilang Ramadhan



Pertimbangkan Dampak Bagi Rakyat Kecil, Anis Keberatan Pungutan Cukai Plastik

“Saya setuju bahwa konsumsi plastik sekali pakai harus dikurangi. Tetapi mari kita cermati dan pertimbangkan dampak dari pungutan cukai plastik jika disetujui”

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (20/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati, menyoroti cukai plastik yang diusulkan Kementerian Keuangan menjadi sumber pemasukan bagi negara, sebagaimana disampaikan dalam rapat kerja komisi XI dengan Menteri Keuangan dengan topik Penjelasan Menkeu tentang Ekstensifikasi Barang Kena Cukai berupa Kantong Plastik, Rabu, (19/02/2020).

“Saya setuju bahwa konsumsi plastik sekali pakai harus dikurangi. Tetapi mari kita cermati dan pertimbangkan dampak dari pungutan cukai plastik jika disetujui” ujar Anis Byarwati.

Anis menjelaskan bahwa penerapan cukai plastik pasti akan meningkatkan harga kantong plastik, yang pada

akhirnya akan mengurangi konsumsinya.

“Permasalahannya adalah apa alternatif penggantinya? Kemungkinannya, tas tebal yang terbuat dari bahan kain atau kertas. Sementara hasil riset di Inggris menunjukkan bahwa tas tersebut justru berpotensi lebih merusak lingkungan dibandingkan kantong plastik biasa ketika di pakai ulang sebanyak 9 hingga 26 kali”, keluh Anis.

Hal lain yang akan muncul, menurut Anis adalah meningkatnya konsumsi plastik sampah. Didasari dengan hasil riset di California yang menunjukkan bahwa larangan penggunaan kantong plastik menyebabkan konsumsi plastik sampah justru meningkat.

“Selama ini masyarakat menggunakan kantong plastik

sekali pakai sebagai tempat sampah. Hasil riset tersebut menyebutkan bahwa larangan kantong plastik, mengurangi konsumsi kantong plastik hingga 1,8jt kg/tahun tetapi justru meningkatkan konsumsi plastik sampah hingga 5,4jt kg/tahun. Ini perlu kita pikirkan”, imbuhnya.

Anis juga mempertanyakan, yang perlu dikendalikan apakah plastiknya atau sampahnya? Anis memandang tidak efektif jika penggunaan plastik dikenakan cukai, sementara sampahnya tidak dikendalikan.

“Perlu terintegrasi. Masyarakat perlu di edukasi dan pemerintah membuat waste management system. Sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan dibenahi”, katanya.

Anis menegaskan jika penanganannya hanya sebagian-sebagian, maka solusinya belum signifikan. Ia menyatakan bahwa saat ini standarisasi pemilihan dan pengolahan sampah masih berbeda-beda. Sebagai contoh, ia menyebutkan perbedaan kategori sampah berdasarkan warna yang masih berbeda



antara pemilihan di Surabaya dan di Jakarta.

“Bagian integrasi lain yang harus dibenahi adalah ketersediaan infrastruktur pengolahan sampah plastik. Dan juga sinergi pemerintah pusat dan daerah”, pungkasnya.

Sisi lain yang disoroti Anis adalah konsumsi plastik yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Jika konsumsi plastik dikenakan cukai, maka otomatis harga plastik akan naik dan berpengaruh pada tingginya harga bagi kelompok menengah ke bawah.

“Kondisi ini akan menjadi masalah ekonomi baru bagi masyarakat umum. Mereka akan merasakan ekonomi biaya tinggi”, tegas Anis.

Anis menyatakan dirinya sangat prihatin. Karena disaat ekonomi sulit seperti sekarang dimana pemerintah menaikkan iuran BPJS kelas 3 dan harga bahan-bahan pokok naik, maka keputusan mengenakan bea cukai bagi penggunaan kantong plastik, sangat tidak tepat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Bebani Rakyat, PKS Tidak Setuju Penerapan Tarif Cukai Plastik

Pemerintah harusnya lebih fokus mengeluarkan kebijakan fiskal dan ekonomi yang mendorong konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi berkualitas,

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (20/02) — Anggota DPR RI Komisi XI Ecky Awal Mucharam menyatakan belum menyetujui usul pemerintah terkait penambahan jenis barang kena cukai berupa produk plastik, dalam pembahasan penerapan tarif cukai plastik antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR, Rabu (19/2/2020).

Menurut Ecky ada banyak hal yang harus pemerintah benahi dahulu dan kaji secara mendalam sebelum penerapan tarif cukai plastik.

"Apalagi tarif ini akan membebani rakyat sebagai

konsumen akhir. Terlebih dilakukan saat ekonomi tertekan, dan pertumbuhan melandai. Justru pemerintah harusnya memberi insentif fiskal agar belanja domestik bertumbuh, bukan menambah beban fiskal sektor domestik untuk rakyat," ungkap Ecky.

Rencana penerapan cukai plastik, ungkap Ecky, difokuskan untuk produk hilir menjadi paradoks dengan dibukanya keran impor sampah plastik dan sampah B3 (Bahan berbahaya beracun) oleh pemerintah sendiri beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyampaikan, jika konteksnya penanggulangan bahaya sampah plastik, pemerintah sudah selayaknya melarang impor sampah plastik dahulu dalam bentuk apapun.

"Pemerintah harusnya lebih fokus mengeluarkan kebijakan fiskal dan ekonomi yang mendorong konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi berkualitas," tutup Legislator Jawa Barat ini.

Foto : dpr.go.id



Junaidi Auly: Stagnan di 5,02 Persen, Waspada Ketergantungan Dengan Cina

“Kami menilai hal ini adalah kegagalan yang berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat, angka stagnannya pertumbuhan ekonomi kita itu bukti bahwa pemerintah hanya mengeluarkan janji manis tanpa merealisasikannya

Ir.H.A. JUNAIDI AULY, M.M

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (17/2)- Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly, menilai bahwa kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sangat mengecewakan.

“Kami menilai hal ini adalah kegagalan yang berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat, angka stagnannya pertumbuhan ekonomi kita itu bukti bahwa pemerintah hanya mengeluarkan janji manis tanpa merealisasikannya,” ungkap Junaidi di Gedung Parlemen, Senayan. (Senin, 17/2/2020)

Akhir 2019, Indonesia hanya mampu tumbuh 5,02 persen, jauh dari asumsi yang ditetapkan pada APBN yaitu 5,3 persen. Angka itu pun sangat jauh kalau dibandingkan

dengan target RPJMN 2015-2019, yang konon akan mencapai 7 persen. Lagi-lagi pemerintah dinilai gagal dalam mengelola pertumbuhan ekonomi nasional.

Legislator PKS asal Lampung ini melanjutkan, ada beberapa catatan penting bagi kami terkait dengan realisasi pertumbuhan 2019. Pertama adalah pertumbuhan triwulan IV yang hanya 4,96 persen. Ini sangat rendah karena biasanya triwulan akhir menjadi salah satu periode pemerintah menggenjot pertumbuhan. Artinya, pemerintah gagal menstimulus ekonomi di tengah-tengah lonjakan belanja negara.

Kedua, kami melihat stabilitas inflasi yang bersifat

semu. Ini terlihat dari penurunan inflasi umum yang tidak diikuti dengan perbaikan inflasi pangan dan daya beli.

“Inflasi pangan mencapai 4,5 persen, hampir menyamai pertumbuhan ekonomi. Jika demikian, ekonomi sangat terpasung oleh inflasi pangan,” ujar Junaidi.

Ketiga, dukungan sektor perbankan melemah, dengan pertumbuhan kredit sekitar 6 persen. Pada saat yang sama, laba bank umum terus tumbuh dan mencapai lebih dari Rp. 100 triliun. Artinya, fungsi intermediasi kurang berjalan, tetapi fungsi bisnis terus melonjak.

Anggota dari Dapil Lampung II ini mengingatkan pemerintah untuk melihat tantangan ekonomi kedepan yang semakin kompleks dan butuh langkah-langkah komprehensif.

“Kedepan, realisasi pertumbuhan ekonomi semakin sulit. Apalagi dengan melihat ekonomi China yang semakin terpuruk karena virus corona. Pemerintah harus antisipasi karena masih banyak sektor yang masih bergantung pada China,” tutup Junaidi.



Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan

BAKN harus menjadi sebuah lembaga yang bersifat tetap dan punya power. Setelah kelembagaan kuat, perlu ada mekanisme yang diatur di mana sebenarnya peran BAKN. Apakah sekedar melakukan penelaahan saja, atau sampai pada tataran bagaimana bisa melakukan tindak lanjut yang lebih bisa menyelesaikan masalah (trouble solving),"

H. AHMAD SYAIKHU

Wakil Ketua BAKN ADPR RI

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhun menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya agar tidak hanya sebatas menelaah akuntabilitas keuangan negara saja.

"BAKN harus menjadi sebuah lembaga yang bersifat tetap dan punya power. Setelah kelembagaan kuat, perlu ada mekanisme yang diatur di mana sebenarnya peran BAKN. Apakah sekedar melakukan penelaahan saja, atau sampai

pada tataran bagaimana bisa melakukan tindak lanjut yang lebih bisa menyelesaikan masalah (trouble solving)," ungkap Ahmad Syaikhun di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (17/2/2020).

Politisi Fraksi PKS ini berharap dalam perubahan aturan-aturan BAKN ke depan, melalui revisi Undang-Undang MD3, penguatan peran dan fungsi BAKN perlu mendapat perhatian serius dan perlu dipertimbangkan. Sehingga dalam telaah-telaah yang dilakukan BAKN, sekaligus diharapkan mampu juga

menyelesaikan berbagai permasalahan yang memang mencuat di tengah kehidupan masyarakat.

"Bagaimana supporting terhadap BAKN itu, bagaimana hasil kajian-kajian baik dari akademisi maupun dari Pusat Kajian DPR RI sehingga betul-betul hasil telaah BAKN ini bisa dipertimbangkan dan menjadi rekomendasi yang membantu menyelesaikan berbagai masalah bangsa, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas," tukasnya.

Ia berharap para profesor di UNSRI tidak hanya memberi masukan sebatas dalam ruangan ini saja, namun pemikirannya tentang BAKN pada ruang-ruang publik misalnya melalui artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah. Pemikiran dan gagasan tersebut sangat penting dalam upaya penguatan peran dan fungsi BAKN bisa tersampaikan kepada publik.

Legislator dapil Jawa Barat VII ini menambahkan, berbagai masalah yang mencuat di masyarakat saat ini harus mendapat perhatian khusus dari BAKN. Tentu dari sekian



banyak masalah yang muncul, BAKN perlu memilah tema mana yang perlu diperhatikan, seperti misalnya mengenai dana otonomi khusus dan dana keistimewaan yang akan ditiadakan.

"Kami berpandangan jika dana Otsus ini berakhir maka akan memiliki dampak yang sangat besar jika belum ada jalan keluar (exit strategy) dari DPR RI. Maka kita bisa bayangkan kebutuhan terhadap

dana otonomi khusus dan keistimewaan ini ketika diputus sedemikian rupa tentu akan menimbulkan blunder dalam pembangunan di berbagai daerah yang mendapat otonomi khusus dan keistimewaan. Ke depan BAKN akan menelaah strategi apa yang tepat untuk mengantisipasi jika dana otonomi khusus dan keistimewaan itu dihentikan," pungkasnya..



Hidayat Nur Wahid Dorong Demokrasi Parlemen Dengan Nilai Islam



المنتدى الإسلامي للبرلمانيون
The International Islamic Forum
for Parliamentarians

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan pentingnya nilai Islam di dalam demokrasi parlemen. Ia mengajak agar rakyat berseamangat dalam memperjuangkan demokrasi melalui parlemen dan meningkatkan kualitas pembelaan terhadap kemanusiaan dan masyarakat tertindas seperti masyarakat Palestina, Rohingya, dan lain-lain.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam pertemuannya dengan Ketua Delegasi The International Islamic Forum of Parliamentarians Dr. Abdul Majid Munsharah. Saat ini Forum Parlemen Muslimin se-Dunia sedang melakukan kunjungan selama 4 hari di Indonesia.

"Mereka menegaskan

bahwa perjuangan melalui parlemen perlu kerjasama, penyebaran, dan penguatan. Sebab, melalui demokrasi dan parlemen banyak hal yang bisa dilakukan untuk kepentingan kemanusiaan. Dalam konteks Islam, ini membuktikan bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin, tidak anti demokrasi, dan membawa kebaikan. Tentu kita menyambut dengan baik ajakan itu," kata Hidayat, dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/20).

Kepada delegasi Forum Parlemen Muslimin, Hidayat juga menjelaskan MPR telah melakukan amandemen UUD untuk menghadirkan kemaslahatan. Misalnya, ketentuan tentang pendidikan nasional yang tidak hanya mengutamakan kecerdasan tetapi juga iman, takwa, dan akhlak mulia.

"Ini menegaskan parlemen bisa menghadirkan kemaslahatan bukan hanya bagi umat Islam tapi juga bagi bangsa," lanjut Hidayat.

Hidayat juga menyampaikan, ada beberapa

pengalaman partai Islam di Indonesia dalam berdemokrasi. Salah satunya adalah pengalaman dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Saya menyampaikan partai Islam, dalam hal ini PKS, bersama komponen partai politik yang lain bisa mengusulkan agar ada UU tentang kewirausahaan nasional. Ini menegaskan partai Islam juga memikirkan tentang ekonomi bangsa. Kita juga mengusulkan UU tentang perlindungan tokoh agama dan perlindungan simbol-simbol agama. Artinya, partai Islam tidak hanya berpikir tentang ulama, tapi juga tokoh agama dalam arti luas," jelasnya.

Sementara itu, usai pertemuan, Ketua Forum Parlemen Muslimin se-Dunia, Dr. Abdul Majid Munsharah menyebutkan dengan adanya forum ini, kita bisa saling bertukar pengalaman dan belajar mengenai undang-undang di negara masing-masing. Dia juga memuji kegiatan demokrasi di Indonesia.



Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A

Wakil Ketua MPR RI

Mereka menegaskan bahwa perjuangan melalui parlemen perlu kerjasama, penyebaran, dan penguatan. Sebab, melalui demokrasi dan parlemen banyak hal yang bisa dilakukan untuk kepentingan kemanusiaan.

"Demokrasi di Indonesia berkembang pesat. Kami banyak belajar dari demokrasi di Indonesia. Keberadaan kami beberapa hari ini menjadi bukti

bahwa demokrasi di Indonesia memang luar biasa bagus. Saling menghormati meski ada perbedaan dan keragaman," ujar Abdul.

Nur Azizah: Perkuat Sinergi Dakwah dengan Latansa

Latansa sebagai sebuah program latihan bagi para wanita untuk terus siaga lahir maupun bathin menjalankan tugas dan tanggung jawab besarnya di keluarga dan masyarakat

HJ. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI

Depok, (16/2) Anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid hadir dalam pembukaan Latihan Wanita Siaga atau Latansa DPD Kota Depok di Bumi perkemahan Cibubur. Dalam sambutannya, Nur Azizah Tamhid menyampaikan apresiasi atas dukungan para kader Perempuan PKS. "Terima kasih atas kader perempuan PKS yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kemenangan PKS khususnya di kota Depok yang saat ini bertambah 1 kursi untuk PKS dari sebelumnya yang hanya memiliki 1 kursi" ujar politisi perempuan PKS tersebut.

Dalam tugas menjalankan

amanah menjadi wakil rakyat di DPR RI yang baru dijalani kurang lebih 4 setengah bulan ini, tentunya ketahanan fisik menjadi bagian penting yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Salah satu cara untuk meningkatkannya adalah dengan mengikuti kegiatan Latansa.

"Latansa sebagai sebuah program latihan bagi para wanita untuk terus siaga lahir maupun bathin menjalankan tugas dan tanggung jawab besarnya di keluarga dan masyarakat" jelas Nur Azizah.

Latansa atau Latihan wanita Siaga DPD Kota Depok diikuti ratusan kader PKS kota

Depok dibuka oleh Presiden PKS Mohamad Shohibul Iman.

Harapan Ibu Nur Azizah Tamhid kepada para kader perempuan PKS yang hadir untuk dapat saling bersinergi demi kemenangan dakwah.

"Kita harus terus bekerja sama untuk memperkokoh dan melanjutkan kemenangan dakwah" tutup Nur Azizah.



Pemerintah Aceh diminta Peduli Situs Monisa

Monisa itu tonggak sejarah Kesultanan Peureulak sebagai daerah yang menjadi muasal masuknya Islam ke Nusantara. Seharusnya itu bisa terawat dan dipugar secara berkala, sehingga bangunan itu akan menjadi bukti kebanggaan kita masyarakat Aceh sebagai wilayah pintu masuk Islam ke Asia Tenggara

H.M. NASIR DJAMIL, M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Aceh / Ketua Forbes

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Aceh yang juga Ketua Forum Bersama Anggota DPR dan DPD RI Asal Aceh M Nasir Djamil berharap agar Pemerintah Aceh menaruh perhatian serius untuk merawat Monumen Islam Asia Tenggara (Monisa) yang terletak di Gampong Paya Meuligo, Kecamatan Peureulak Kota, Aceh Timur. Karena selama ini, kondisi situs budaya dan akses menuju ke lokasi Monisa tersebut memprihatinkan.

Hal itu disampaikan Nasir Djamil dalam acara seminar nasional yang bertemakan Aceh Pusat Peradaban Islam Terawal

Di Asia Tenggara, yang berlangsung di Aula Pasca Sarjana UIN Ar Raniriy Banda Aceh, Senin (17/2/2020).

Ketua Forum Bersama Anggota DPR dan DPD RI ini berpendapat bahwa Monisa yang diresmikan oleh Ali Hasjmy itu merupakan bangunan penting sebagai bukti & tonggak sejarah masuknya Islam pertama kali di Asia Tenggara.

"Monisa itu tonggak sejarah Kesultanan Peureulak sebagai daerah yang menjadi muasal masuknya Islam ke Nusantara. Seharusnya itu bisa terawat dan dipugar secara berkala, sehingga bangunan itu

akan menjadi bukti kebanggaan kita masyarakat Aceh sebagai wilayah pintu masuk Islam ke Asia Tenggara." ujar Nasir Djamil dalam sambutannya.

Selanjutnya Nasir menegaskan, bahwa sangat penting adanya upaya-upaya serius dari pemerintah untuk merawat situs Monisa tersebut, karena bukti sejarah itu harus ditunjukkan ke masyarakat luas termasuk komunitas Internasional bahwa Agama Islam memang masuk ke Asia Tenggara melalui wilayah Aceh, bukan daerah Barus seperti yang pernah di resmikan tugunya oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Penting sekali masyarakat luas juga termasuk masyarakat Internasional harus tahu bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara melalui wilayah Aceh. Maka bangunan-bangunan seperti Monisa itu dan berbagai makam-makam di sekitarnya harus dirawat dan diperhatikan dengan baik agar ia tetap menjadi bukti sejarah yang otentik," tegas Nasir.

Lebih lanjut, terkait tidak adanya dokumentasi jelas yang mendeskripsikan keberadaan situs-situs sejarah di Monisa



tersebut, Nasir Djamil berharap agar Pemerintah Aceh melalui Dinas & lembaga terkait berupaya untuk membuat dokumen-dokumen itu. Hal ini agar pihak yang berkunjung ke sana, serta juga masyarakat luas bisa memahami dan bisa mengkaji keberadaan dari situs-situs sejarah itu.

"Kita berharap situs itu ada dokumen jelas yang bisa mendeskripsikan asal usul dan keberadaan peninggalan sejarah di Monisa itu. Jadi, siapa pun yang berkunjung ke sana bisa memahami dan

punya rasa kebanggaan dan rasa memiliki. Jadi nantinya masyarakat kita juga tidak ahistoris terhadap perjalanan peradaban bangsanya sendiri" pungkaskan Nasir.

Seminar Nasional itu sendiri diisi oleh beberapa pemerhati baik dari Jakarta maupun dari Aceh, yaitu Azyumardi Azra (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Edward McKinnon (Arkeolog Inggris yang sudah menetap di Indonesia), dan Misri A. Muchsin (Guru Besar UIN Ar Raniriy Banda Aceh).



INTERNATIONAL

Pidato pada Konferensi Moslem World League

Jenewa, Swiss (20/02) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, memberikan Pidato dalam sesi penutup pada Konferensi Moslem World League di Gedung PBB Jenewa Swiss pada Kamis (20/02). Acara yang mengambil tema "Protecting the Youth from Extremist and Violent Ideologies" ini dihadiri oleh ratusan tokoh lintas Agama dari empat benua.

KOMISI IX

Sambut Kedatangan WNI dari Natuna

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati bersama rombongan menyambut kedatangan sejumlah WNI yang telah menjalani observasi Virus Corona di Natuna saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/2). Sebanyak 238 WNI yang telah menjalani masa observasi virus Corona selama 2 pekan telah dinyatakan sehat oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan diperbolehkan kembali ke keluarganya

DPR

Rapat Gabungan Bahas Selisih Biaya BPJS

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar dan Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam hadir dalam Rapat Gabungan DPR RI dengan Pemerintah Pusat membahas Pembiayaan Selisih Biaya Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPBU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III, Membahas Permasalahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Membahas Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Program JKN, Selasa, 18 Februari 2020.



DAPIL

Hadiri Rakorda PKS Kabupaten Serang

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA. hadir dan Memberikan Materi dalam Acara Rakorda PKS Kabupaten Serang. Ahad 16 Februari 2020 di Hotel Jayakarta Anyer Kab. Serang. Turut Hadir dalam acara ini Ketua dan Pengurus PKS DPW Banten, Ketua dan Pengurus PKS Kab. Serang, Para Ketua DPC dan juga Perwakilan dari beberapa Partai Politik



KOMISI X

Tinjau Kesiapan Venue PON XX Papua

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Persiapan PON XX Tahun 2020 Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meninjau kesiapan venue-venue yang akan digunakan pada ajang Pesta Olahraga Nasional (PON) ke XX tahun 2020 di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Jumat, 21 Februari 2020. #KunkerDPR. News/Foto : dpr.go.id



KOMISI IX

Mufida Sambut Kedatangan WNI dari Natuna

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati (Hijab orange) bersama rombongan Mufidayati kedatangan sejumlah WNI yang telah menjalani observasi Virus Corona di Natuna saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/2). Sebanyak 238 WNI yang telah menjalani masa observasi virus Corona selama 2 pekan telah dinyatakan sehat oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan diperbolehkan kembali ke keluarganya



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI